IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS DI KABUPATEN KARIMUN)

Oleh :
Rindiani Safitri
NIM. 180563201042

ABSTRAK

Keberadaan pengemis ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari pada kehidupan bermasyarakat. Permasalahan ini termasuk masalah yang sulit dipecahkan karena pemerintah sendiri sudah merencanakan banyak hal untuk mengentaskan permasalahan ini hampir diseluruh kabupaten atau kota yang terdapat di Indonesia. Banyak nya pengemis mampu memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka sehinggal hal tersebut bisa meresahkan masyarakat.Salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam menertibkan dan melakukan pembinaan kepada pengemis dikabupaten karimun. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, 2016dengan indikator: Standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih belum meratanya sosialisasi peraturan daerah dan masih adanya pengemis di kabupaten karimun. Kurangnya sumber daya finansial membuat tidak adanya rumah singgah sehingga pembinaan kepada pengemis belum bisa dilakukan. Dalam hal melakukan penertiban kepada pengemis ada 3 instansi pemerintah yang turut serta membantu yaitu Satpol PP, Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Karimun.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengemis

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION 1 YEAR 2019 CONCERNING PUBLIC ORDER (STUDY ON CONTROLLING AND DEVELOPING BEGGERS IN KARIMUN DISTRICT)

By :
Rindiani Safitri
NIM. 180563201042

ABSTRACT

The existence of beggars is a social phenomenon that is difficult to avoid in social life. This problem is a difficult problem to solve because the government itself has planned many things to alleviate this problem in almost all districts or cities in Indonesia. The number of beggars is able to trigger the occurrence of crimes committed by them so that it can disturb the community. One way to deal with this social problem is the Karimun Regency Government issues the Karimun Regency Regional Regulation 1 of 2019 concerning public order. This study aims to determine the implementation of regional regulation 1 of 2019 regarding public order in controlling and providing guidance to beggars in Karimun Regency. This research method is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study uses the implementation theory of Van Meter and Van Horn in Subarsono, 2016 with indicators: Standards and policy objectives, resources, inter-organizational relations, social, political and economic conditions, disposition of implementors. The results of the study show that the implementation of regional regulation 1 of 2019 regarding public order has not run optimally, because there is still uneven socialization of regional regulations and there are still beggars in Karimun district. The lack of financial resources means that there are no shelter houses so that training for beggars cannot be carried out. In terms of controlling beggars, there are 3 government agencies that participate in helping, namely the Satpol PP, the Social Service and the Karimun Regency Police.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Beggars